
TRANSFORMASI TRADISI MASATIA PADEM MENJADI MASATIA RAMBUT PASCAINTERVENSI KOLONIAL DI BALI 1905

I Gusti Agung Ngurah Dharma Yuda, Safin Karunia Rojuli

Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Email: *i.gusti.agung.ngurah-2020@fib.unair.ac.id*

Email: *safin.karunia.rojuli-2020@fib.unair.ac.id*

Abstrak

Intervensi Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1905 menghapus tradisi *masatia* di Bali, yaitu praktik janda atau abdi mengorbankan diri saat upacara kremasi penguasa. Dengan metode penelitian sejarah yang meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, serta menggunakan sumber arsip lokal dan kolonial, penelitian ini menemukan adanya transformasi tradisi setelah penghapusannya. Pada 1939 muncul tradisi *masatia rambut* sebagai bentuk baru kesetiaan dan pengabdian, yang bersifat lebih humanis. Berbeda dengan *masatia*, tradisi ini diinisiasi masyarakat secara kolektif, dilakukan oleh pria, dan tidak dipaksakan oleh kerajaan. Transformasi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Bali menyesuaikan ekspresi dan kedinamisan budaya mereka dalam konteks perubahan sosial-politik pasca pengaruh kolonial.

Kata Kunci: *Bali; intervensi; kolonialisme; masatia; masatia rambut; transformasi*

THE TRANSFORMATION OF MASATIA PADEM TRADITION INTO MASATIA RAMBUT FOLLOWING THE 1905 COLONIAL INTERVENTION IN BALI

Abstract

The Dutch Colonial Government's intervention in 1905 abolished the Balinese tradition of masatia, a ritual in which widows or servants sacrificed themselves during the cremation of their ruler. Using the historical research method, topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography, along with local and colonial archival sources, this study finds a transformation of the tradition after its abolition. By 1939, the new practice of masatia rambut emerged as a more humanistic form of loyalty and devotion. Unlike the original masatia, this tradition was collectively initiated by the community, performed by men, and was not enforced by the royal court. This shift illustrates how Balinese society adapted the expression and dynamism of their culture within the context of socio-political changes following colonial rule.

Keywords: *Bali; colonialism; intervention; masatia rambut; masatia tradition; transformation*

I. PENDAHULUAN

Pulau Bali, yang dijuluki *Island of Gods*, *The Last Paradise*, dan *Island of a Thousand Temples*, dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya tetapi juga karena kehidupan budaya dan religius yang dinamis. Melalui berbagai ritual keagamaan, masyarakat Bali menjaga kelestarian peradaban Hindu. Ritual-ritual tersebut mencakup *odalan* dan *usaba* untuk memuja dewa di pura, *mecaru* untuk menjaga keseimbangan alam, serta upacara daur hidup seperti *otonan*, *metatah*, dan *ngaben* (Korn, 1932).

Upacara *ngaben* menjadi yang menarik di antara upacara lainnya. *Ngaben* merupakan upacara kremasi yang bertujuan mengembalikan unsur tubuh manusia ke alam sekaligus melepaskan arwah dari ikatan duniawi (Putra & Santoso, 2020). Meski dilaksanakan dalam suasana duka, upacara ini justru berlangsung meriah, dan semakin tinggi status sosial seseorang, semakin megah pula pelaksanaannya.

Selama abad ke-16 hingga awal abad ke-20, pelaksanaan *ngaben* di kalangan bangsawan Bali memiliki aspek menarik yang membedakannya dari golongan lain. Upacara tersebut kerap disertai praktik pengorbanan diri oleh puluhan hingga ratusan wanita yang membakar dirinya hidup-hidup. Ritual ini dikenal dengan istilah *masatia* atau secara lengkap tertulis *masatia-satiaan padem* (ikut mati) (ANRI, 1964). *Masatia* adalah praktik religius yang berkembang di lingkungan bangsawan Bali, ketika para janda secara sukarela membakar diri pada upacara kremasi suaminya sebagai bentuk kesetiaan dan penghormatan terakhir. Dalam praktiknya, tidak hanya janda tetapi juga para abdi turut berpartisipasi, menjadikan tradisi ini sering berujung pada bunuh diri massal. Perdebatan mengenai praktik ini sangat kompleks, seperti “kotak pandora” yang mencerminkan sisi kelam sekaligus nilai-nilai sosial masyarakat Bali masa lampau (Agung, 2010).

Lokalitas masyarakat Bali menganggap tradisi ini sebagai bentuk pengorbanan yang berlandaskan pada kesucian hati dan keikhlasan mengenai pengabdian sampai akhir. Selain itu, pengorbanan diri melalui *masatia* dipandang sebagai tindakan terhormat bagi para janda, keluarga dan pengikut kerajaan yang berduka (Agung, 2010). Tradisi-tradisi semacam ini, sebelumnya telah dijumpai di Jawa dan Sunda pada masa Hindu sekitar abad ke-15 hingga 16 berdasarkan catatan kuno Ma Huan (1413 - 1415) dan Tome Pires (1515) (Pires, 1944).

Memasuki periode interaksi yang intensif dengan bangsa Barat, tradisi *masatia* semakin menarik perhatian para penjelajah yang terkejut menyaksikan puluhan hingga ratusan wanita rela mengorbankan diri pada upacara kremasi bangsawan. Tradisi ini telah tercatat sejak abad ke-16 dan semakin sering dilaporkan oleh agen-agen kolonial pada abad ke-19. Pemerintah Belanda yang menganggap *masatia* sebagai praktik biadab, sehingga sejak 1903 mereka menekan penguasa lokal untuk menghapusnya. Melalui kontrak politik tahun 1905, tradisi *masatia* akhirnya dihapus secara resmi di seluruh Bali.

Penghapusan tradisi *masatia* mendorong masyarakat Bali untuk mengubah tradisi tersebut menuju bentuk baru yang lebih humanis. Pada 1939, *masatia* dalam bentuk *masatia-satiaan padem* yang dianggap ekstrem dan mengarah pada tindakan bunuh diri massal bertransformasi menjadi *masatia rambut* sebagai bentuk pengganti tradisi yang telah dilarang oleh pemerintah kolonial. Tradisi baru ini dilaksanakan dua kali, yakni di Mengwi pada tahun 1939 dan di Klungkung pada tahun 1965, menandakan adanya transformasi tradisi masyarakat Bali dalam upaya mempertahankan nilai melalui bentuk simbolik yang lebih humanis dan selaras dengan zaman.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan lima tahap, yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi atau kritik sumber (internal dan eksternal), interpretasi (analisis dan sintesis), serta historiografi atau penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 2013). Sumber

penelitian meliputi arsip lokal Bali berupa *babad* dan *kakawin*, serta arsip kolonial seperti naskah perjanjian, laporan utusan, dan surat kabar yang berkaitan dengan tradisi *masatia*. Penelitian ini juga didukung oleh sumber sekunder berupa buku dan jurnal yang diakses melalui kunjungan ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Airlangga, serta situs daring seperti books.google.com dan jstor.org.

II. PEMBAHASAN

A. Melacak Asal-Usul Tradisi *Masatia* di Bali

Secara harfiah, istilah *masatia* berasal dari akar kata *satia*, yaitu serapan Bahasa Sanskerta yang berarti jujur atau setia, bila ditambahkan dengan imbuhan *ma-*, *masatia* berarti bentuk tindakan kesetiaan. Dalam kamus Bahasa Bali kata *masatia* berarti tindakan kesetiaan seorang istri dengan cara bunuh diri terjun ke dalam api saat upacara pembakaran jasad suaminya (Partami et al, 2016). Selain *masatia*, muncul pula istilah *bela* yang merujuk pada penyebutan orang yang mengorbankan diri atau dalam bentuk verba menjadi *ma-bela*. Akan tetapi, istilah *masatia* lebih populer digunakan untuk menggambarkan praktik ini. Menurut Putra Agung, *masatia* dibedakan dalam dua jenis berdasarkan cara pengorbanannya, yang pertama adalah *satia alabuh geni/apwi*, yaitu dengan melompat pada api sedangkan yang kedua adalah *satia mapatrem/matuwek*, yaitu dengan menikam tubuh menggunakan keris (Agung, 2010).

Tradisi *masatia* di Bali pertama kali tercatat sekitar abad ke-16 dan dilestarikan hingga permulaan abad ke-20. Pelaksanaan tradisi *masatia* di Bali terbatas ketika seorang bangsawan atau keluarga kerajaan meninggal. Istri mendiang mengorbankan diri dengan cara yang ditetapkan, baik dengan melompat ke api maupun menikam diri sesaat sebelum dibakar. Pelaksanaannya yang terbatas di kalangan bangsawan membuat *masatia* dikenal sebagai tradisi istana yang eksklusif. Tidak jarang, saat seorang bangsawan meninggal, para pelayan dan budak wanitanya ikut mengorbankan diri.

Asal-usul tradisi ini belum dapat dipastikan, meskipun telah dilestarikan selama berabad-abad. Sejumlah peneliti Barat berupaya menelusuri akarnya dengan mengaitkannya pada praktik pengorbanan diri dari India yang kemudian menyebar ke Jawa pada masa Hindu dan meluas hingga ke Bali (Vickers, 1989). Pengaruh penyebaran agama Hindu dari India ke Nusantara yang berlangsung sejak abad ke-4 memang memengaruhi berbagai aspek kebudayaan masyarakat, sehingga tidak heran apabila asal-usul *masatia* sering dikaitkan dengan hal tersebut.

India memang mengenal tradisi pengorbanan para janda dengan istilah *sati*. Praktik *sati* di India telah dikenal sejak lama, catatan paling awal yang ditemukan tentang praktik ini adalah sumber Yunani saat ekspedisi Alexander Agung ke lembah sungai Indus sekitar abad ke-4 SM (Fisch, 2005). *Sati* di India awalnya dilakukan secara terbatas oleh para keluarga bangsawan. Akan tetapi, sejak abad ke-15 praktik ini meluas tanpa memandang kasta, hingga pada akhirnya kematian seorang pria hampir selalu diikuti oleh pengorbanan diri sang istri sebagai bentuk kesetiaan.

Catatan para penjelajah yang mengunjungi beberapa daerah di Jawa pada masa Hindu, khususnya antara abad ke-14 hingga ke-16, menyebutkan adanya praktik serupa dengan *sati* di India. Ma Huan, seorang Tionghoa Muslim yang ikut dalam ekspedisi Ming pimpinan Cheng Ho pada abad ke-14, menuliskan bahwa ketika ia mengelilingi ibu kota Majapahit, terdapat praktik pengorbanan diri oleh para janda yang bahkan melibatkan para pelayan (Huan, 1970). Ritual tersebut biasa dilaksanakan saat para pemimpin dan orang-orang dengan status tinggi meninggal. Tome Pires seorang pelancong Portugis juga pernah mencatat tradisi serupa dilaksanakan di wilayah Jawa pada abad ke-16. Sekitar tahun 1515 ditemukan ritual pengorbanan diri yang berlangsung di wilayah Blambangan dan Gamda (sekitar Surabaya-Panarukan) (Pires, 1944). Selanjutnya Pires juga menemukan tradisi serupa di daerah Sunda, bagian barat pulau Jawa. Pires menjelaskan bahwa motivasi para wanita tersebut mengorbankan diri bukan karena paksaan tetapi atas dasar kemauan sendiri.

Penjelajah Barat berikutnya adalah Antonio Pigafetta yang mencatat lebih detail dalam laporannya (Stanley, 1874). Ia menyebutkan bahwa telah menjadi kebiasaan di Jawa apabila seorang pemimpin meninggal, istri yang dicintai ditakdirkan untuk ikut dibakar hidup-hidup dalam api yang sama. Selain itu, seorang penjelajah Inggris Thomas Cavendish juga mencatat adanya tradisi pengorbanan diri di Blambangan pada akhir abad ke-16. Bentuk pengorbanan diri yang ia temukan adalah dengan keris dan tidak dijelaskan kematian menggunakan api. Para wanita menikam diri menggunakan keris lalu memandikan tubuh mereka dengan darah mereka sendiri dari wajah hingga badan (Purchas, 1905).

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, di luar wilayah-wilayah Nusantara yang menerima pengaruh Hindu, juga ditemukan tradisi pengorbanan diri dengan pola serupa. Sebagai contoh, di Sumba praktik semacam ini masih bertahan hingga pasca-kemerdekaan Indonesia. Dalam upacara pemakaman golongan *maramba* (bangsawan Sumba), para pelayan atau budak turut dikubur hidup-hidup sebagai bekal kubur agar dapat terus melayani tuannya di alam baka. Tradisi ini bahkan baru benar-benar dihentikan pada tahun 1999 (Barokah, 2016). Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesamaan pola dengan yang terjadi di Jawa, Sunda, dan Bali, yakni relasi patron–klien yang kuat antara tuan dan hamba, di mana pengorbanan diri dimaknai bukan sebagai tindakan religius, melainkan sebagai wujud kesetiaan dan hierarki sosial.

Hal ini mematahkan asumsi peneliti Barat pada masa kolonial yang menganggap tradisi pengorbanan diri di Nusantara, khususnya *masatia* di Bali, sebagai pengaruh langsung dari praktik *sati* di India. Ritual *sati* di India bersifat individual, terbatas pada istri mendiang, dan berlandaskan nilai kesetiaan dalam hubungan suami-istri (Fisch, 2005). Sebaliknya, praktik pengorbanan diri di Nusantara bersifat elitis dan sarat makna sosio-politis sebagai simbol kesetiaan serta legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, *masatia* di Bali merupakan ekspresi lokalitas yang memadukan kekuasaan, kesetiaan, dan penghormatan dalam satu sistem sosial yang kompleks, bukan sekadar warisan dari India.

B. Perkembangan Tradisi *Masatia* Selama Abad ke-16 – Abad ke-19

Masatia di Bali merupakan praktik eksklusif yang hanya dilakukan ketika seorang raja atau anggota keluarga bangsawan meninggal (Creese, 2012). Tradisi ini berlangsung turun-temurun hingga abad ke-20 dan tidak hanya melibatkan istri mendiang, tetapi juga abdi dan pelayan yang setia. Jumlah wanita yang mengorbankan diri tergantung dengan kedudukan mendiang orang yang meninggal sehingga semakin tinggi status orang yang meninggal maka jumlah wanita yang *masatia* semakin banyak bahkan mencapai ratusan jumlahnya.

Tradisi *masatia* juga dapat dipahami sebagai hasil penafsiran masyarakat Bali terhadap kisah-kisah kesetiaan istri dalam *kakawin* (Creese, 2012). Beberapa kisah heroik dalam teks-teks tersebut membentuk pandangan bahwa seorang istri bangsawan berkewajiban untuk *masatia*. Dalam *Kakawin Bharatayuddha* diceritakan Satyawati yang menyusul kematian suaminya Salya serta Ksitisundari yang wafat mengikuti Abimanyu. Kisah serupa juga muncul dalam *Kakawin Kresnayana* melalui Yajnowati yang menyusul Samba, dan dalam *Kakawin Krsnantaka* ketika seluruh istri Kresna memilih mati bersama suaminya.



Gambar 1. Ilustrasi kremasi di Bali 1597
Sumber: Repro dari Lodewyckz (1915)

Berdasarkan catatan yang ada, praktik *masatia* di Bali telah berlangsung lebih dari enam abad sejak abad ke-16. Catatan paling awal berasal dari laporan rombongan pelayaran Cornelis de Houtman yang mendarat di Bali pada 25 Januari 1597. Lintgents, salah satu anggotanya, mendengar kabar bahwa di Bali telah menjadi kebiasaan ketika seorang suami meninggal, istrinya ikut ke dalam api pembakaran. Tradisi tersebut diiringi musik, dan para wanita melompat ke pembakaran yang disiram minyak serta cendana agar api membesar (Lodewyckz, 1915).

Catatan saksi mata pertama berasal dari Jan Oosterwijck, utusan VOC yang berkunjung ke Gelgel pada 1633 untuk meminta dukungan terhadap Mataram. Berdasarkan *Babad Dalem*, saat itu raja keenam, Dalem Di Made, sedang mempersiapkan kremasi ibundanya pada 21–22 Maret

1633 (Heurnius, 1856). Catatan yang sama juga menyebutkan bahwa pada kremasi dua pangeran sebelumnya, masing-masing diiringi oleh 42 dan 34 wanita yang *masatia*, terdiri atas istri, selir, dan pelayan.

Selanjutnya, memasuki abad ke-17 kondisi politik Bali berubah dan wilayahnya terbagi atas beberapa kerajaan (*puri*). Periode tersebut dimulai sekitar tahun 1686 pasca keruntuhan kerajaan Gelgel di Bali. *Puri-puri* yang ada kala itu, masih melestarikan tradisi *masatia* pada pelaksanaan upacara kremasi raja maupun bangsawan. Fakta tersebut didasari oleh temuan berupa catatan-catatan lokal maupun asing yang merekam adanya praktik *masatia* di beberapa puri yang ada di Bali. Untuk mengetahui pelaksanaan *masatia* yang tercatat pasca periode Gelgel lihat tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan *masatia* abad ke-18-19.

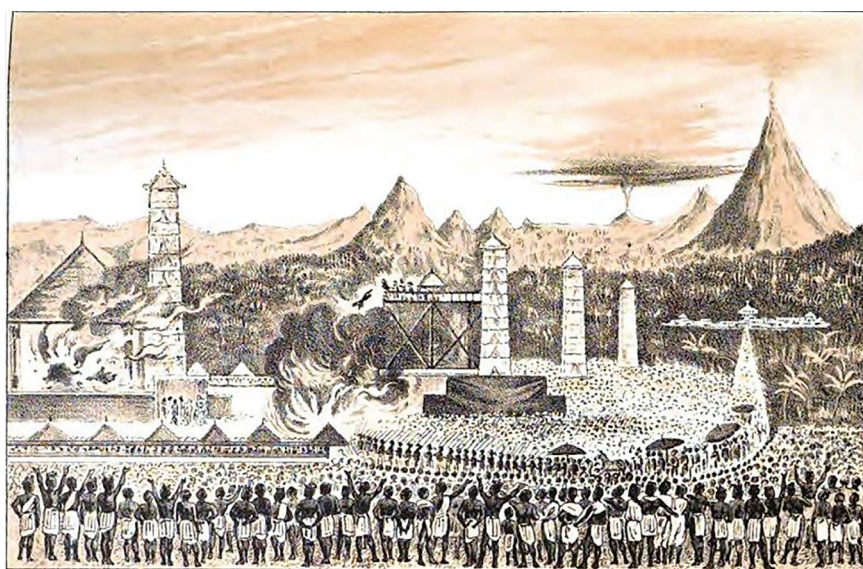
Tahun	Keterangan	Sumber
1700-an	Ni Gusti Ayu Made melakukan <i>masatia</i> setelah kematian suaminya, Ida Pedanda Wanasara.	<i>Babad Mangwi & Pangeling-eling Indik Masatia</i> , koleksi Puri Agung Karangasem
1723	Istri raja I Dewa Gde Payangan melakukan <i>masatia</i> menyusul suaminya di medan perang.	<i>Pangeling-eling Indik Masatia</i> , koleksi Puri Agung Karangasem
1735	Seluruh istri I Gusti Agung Ktut Agung di Mengwi <i>masatia</i> .	<i>Pangeling-eling Indik Masatia</i> , koleksi Puri Agung Karangasem
1813	20 wanita ikut <i>masatia</i> pada kremasi Pangeran Buleleng Gusti Wayahan Jelantik.	Crawfurd (1820)
1829	7 wanita <i>masatia</i> pada kremasi Raja Badung Gusti Gde Ngurah Pemecutan.	Dubois (1829)
1837	2 Istri dan seluruh selir Raja Karangasem Ida Anglurah Gde Ngurah <i>masatia</i> .	<i>Pangeling-eling Indik Masatia</i> , koleksi Puri Agung Karangasem
1847	3 istri Raja Gianyar Dewa Manggis <i>masatia labuh geni</i> .	Helms (1847) Friederich (1849)
1849	Anak Agung Istri Adi <i>masatia</i> di medan perang menyusul suaminya raja Karangasem Ida Anglurah Gde Karang.	<i>Pangeling-eling Indik Masatia</i> , koleksi Puri Agung Karangasem
1866	Istri Anak Agung Ngurah di Karangasem <i>masatia</i> dengan menikam diri menggunakan keris.	<i>Pangeling-eling Indik Masatia</i> , koleksi Puri Agung Karangasem
1873	Istri Anak Agung Gde Mayun di Mengwi <i>masatia</i> melompat ke api pembakaran.	<i>Pangeling-eling Indik Masatia</i> , koleksi Puri Agung Karangasem
1890	Seluruh istri Cokorda Mengwi terakhir <i>masatia</i> melompat ke kobaran api.	<i>Pangeling-eling Indik Masatia</i> , koleksi Puri Agung Karangasem

Sumber: Yuda, I. G. A. N. Dharma, 2024

C. Intervensi Pemerintah Kolonial terhadap Tradisi *Masatia*

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mulai memperkuat otoritasnya di seluruh Hindia dengan strategi penaklukan militer untuk memperjelas batas-batas kekuasaan atas wilayah otonom di luar Jawa (Cote, 1996). Keberadaan kerajaan-kerajaan otonom dianggap mengancam kontrol penuh pemerintah kolonial. Dalam periode ini, Belanda melancarkan ekspansi ke berbagai daerah seperti Aceh, Jambi, Kalimantan, Flores, dan Sulawesi Selatan, sebelum akhirnya menjadikan Bali sebagai sasaran berikutnya (Nordholt, 1996).

Berbeda dari daerah lain, Bali tidak menawarkan keuntungan ekonomi yang besar, namun Belanda merasa memiliki beban moral terhadap kondisi sosial di sana (Ricklefs, 2007). Kala itu, empat kerajaan otonom di Bali Selatan, yaitu Klungkung, Badung, Tabanan, dan Bangli, masih memiliki otoritas kuat dengan intervensi kolonial yang terbatas (Agung, 1989). Kekuatan dan legitimasi para raja di mata rakyat memicu anggapan Belanda bahwa para penguasa lokal bertindak sewenang-wenang, sehingga menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan intervensi politik dan militer.



Gambar 2. Gambaran *Masatia* di Gianyar 20 Desember 1847
Sumber: Repro dari Helms (1882)

Tingginya prestise yang diterima para penguasa dianggap tidak sebanding dengan apa yang mereka berikan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemasukan kerajaan dari pajak, kontrak sewa, dan penyelundupan candu dituding hanya menguntungkan raja (Ricklefs, 2007). Pemerintah berinisiatif mengatur hal tersebut agar berjalan sesuai dengan sistem administrasi kolonial dengan kata lain, mereka juga ingin mengambil bagian atas keuntungan tersebut. Selain itu, penguasa Bali dituding sebagai sosok yang zalim (kejam, bengis, dan tidak berbelas kasihan), karena membiarkan rakyat menderita akibat peperangan antarkerajaan, perbudakan, dan hukuman biadab yang mereka ciptakan. Hal tersebut dirumuskan sebagai sebuah kekacauan sistematis yang terjadi sehingga beban moral kolonial yang dimaksud adalah usaha untuk membangun peradaban yang lebih baik.

Alasan-alasan untuk memperluas kekuasaan tersebut akhirnya memberikan gambaran tentang sebuah pola pikir baru mengenai tanggung jawab dan hak istimewa kolonial, yang dikembangkan bersama kebijakan tersebut. Dengan didasari semangat *the white man's burden*, pola pikir baru yang tercipta adalah bahwa sebuah negara kolonial harus menjamin kepastian hukum atas manusia dan harta benda, memastikan perdamaian dan ketertiban, memiliki kontrol monopolistik atas pemungutan pendapatan, dan menggunakan pendapatan semacam itu untuk "kepentingan publik." Pemerintah kolonial pun merasa berhak melakukan intervensi karena para penguasa lokal di Bali tidak mencerminkan hal yang diuraikan tersebut (Bruyn dalam Robinson, 1995).

Pemerintah Hindia Belanda memandang bahwa, apabila mereka tidak mengambil bagian untuk menghentikan terhadap permasalahan tersebut maka pemerintah juga ikut bersalah dan sama terkutuknya seperti para penguasa lokal (Craandijk, 1906). Residen Bali-Lombok F.A Liefcrinck (1896-1901) sejak awal mengisyaratkan bahwa di masa mendatang kekuasaan kolonial di seluruh Pulau Bali memang harus benar-benar terlaksana. Oleh karena itu, tidak heran apabila Belanda sejak awal abad ke-20 berusaha menciptakan konflik untuk mempercepat penguasaan secara penuh atas tanah Bali.

Satu-satunya cara yang digunakan pemerintah kolonial adalah terus menerus menyorot kesewenang-wenangan para raja di Bali. Salah satu yang menjadi sorotan paling awal adalah keberadaan tradisi *masatia*. Tradisi yang erat kaitannya dengan penghormatan terhadap penguasa tersebut, menjadi sasaran permasalahan yang harus segera diberantas oleh pemerintah. *Masatia* dimasukkan ke dalam konsensus mengenai kesewenang-wenangan penguasa lokal sebagai sebuah hukuman biadab yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sehingga mengarah pada pembunuhan massal.

Penghapusan *masatia* berawal dari wilayah Bali Utara yaitu Buleleng dan Jembrana pasca penaklukan militer tahun 1854 dan 1855. Sejak 1860, tradisi *masatia* telah dihapuskan di kedua wilayah tersebut karena menjadi wilayah administratif kolonial (*rechtstreeksch bestuur*) (K.V., 1891). Pada tahun 1900-an, Pemerintah Hindia Belanda mulai menaruh perhatian khusus dengan melakukan penyelidikan terhadap keberadaan tradisi *masatia* yang belum dihapuskan secara jelas di daerah-daerah otonom Bali bagian selatan.

Penyelidikan mengenai pelaksanaan *masatia* dimulai dari laporan-laporan menjelang tahun 1900-an (K.V., 1901). Pada Agustus 1902, residen memerintahkan penyelidikan untuk meninjau kemungkinan penghapusan tradisi tersebut. Hasilnya, Karangasem dan Gianyar yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial menyetujui penghapusan *masatia* dan bersedia melanggar adat. Dari hal ini, pemerintah menyimpulkan bahwa sistem keagamaan Hindu Bali bukanlah dasar pelaksanaan *masatia*. Namun, raja-raja di wilayah otonom menolak dengan alasan tradisi *masatia* sudah menjadi adat turun-temurun dan terkait erat dengan agama (K.V., 1904).

Secara kebetulan, pada Maret 1903 raja di kerajaan otonom Tabanan meninggal. Seperti yang lazim terjadi di Bali, apabila seorang raja meninggal maka para istri, selir ataupun pelayan secara sukarela membuktikan kesetiaannya dengan bertekad untuk *masatia* menyusul kematian

sang raja. Momentum ini akhirnya digunakan untuk benar-benar bertindak tegas untuk menghapus keberadaan tradisi yang mereka anggap biadab tersebut.

Awalnya menurut berita yang beredar, hingga bulan Agustus ketika pengesahan akta pengangkatan raja yang baru, tidak ada satu pun janda dari mendiang yang menyatakan diri ikut *masatia* ketika puncak upacara. Ketika mendengar hal tersebut, pemerintah tampaknya tidak mempercayai penuh kabar tersebut, para pejabat tetap mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan tradisi tersebut dengan meyakinkan raja agar menuruti kemauan pemerintah (K.V., 1904).

Laporan *De Locomotief* (2 November 1903) menyebut bahwa pada pertengahan Oktober 1903 secara mengejutkan pemerintah menerima kabar bahwa dua janda Raja Tabanan akan *masatia*, meskipun tradisi itu sebelumnya dinyatakan telah dihentikan. Setelah dikonfirmasi, kabar tersebut benar karena upacara pemberkatan telah dilakukan pada 2 Oktober sehingga pembatalan dianggap terlambat. Kegagalan pemerintah membujuk Raja Tabanan mendorong terjadinya intervensi militer. Dua kapal perang, Gelderland dan Koningin Regentes, dikirim menuju Pantai Yeh Gangga pada 23 dan 25 Oktober 1903 untuk menunjukkan kekuatan dan menekan Raja Tabanan agar tunduk (K.V., 1904).

Segala usaha awal yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda untuk menghalangi pelaksanaan *masatia* di Tabanan berlangsung sia-sia. Menurut keterangan saksi mata yang dikirim, dua orang wanita tetap menceburkan diri ke dalam api menyusul kematian sang raja. Agresi militer yang direncanakan untuk memberi pelajaran pada Raja Tabanan juga gagal karena berbagai desakan publik dan kondisi militer saat itu. Eskalasi konflik akhirnya ditarik dari permulaan dan rekonsiliasi dipilih menggunakan jalan damai.

Pada 8 Desember 1903, gubernur jenderal melaporkan melalui telegram bahwa Raja Tabanan menyatakan kesediaannya memenuhi permintaan pemerintah seperti tertuang dalam peringatan tertanggal 26 November 1903. Raja menegaskan komitmennya kepada kontrolir, namun meminta penangguhan karena kerajaan masih disibukkan dengan rangkaian upacara pasca kremasi ayahnya. Permintaan ini disetujui pemerintah, menandai awal penyelesaian konflik tersebut.

Pada 20 Januari 1904, Residen Bali-Lombok J. Esbach bersama kontrolir Schwartz menuju ke Tabanan untuk melakukan penandatanganan kontrak baru terkait penghapusan *masatia* di Tabanan. Raja Tabanan Gusti Ngurah Rai yang bergelar Gusti Ngurah Agung (sama dengan ayahnya) hadir bersama I Gusti Gde Ngurah Made Kaleran selaku *patih* dan didampingi beberapa punggawa. Dalam kontrak yang berjudul *Contract Met Tabanan (Afschaffing van het Mesatia)*, raja menyatakan:

”Raja Tabanan berjanji pada dirinya, dan keturunannya, mulai hari ini menghapus adat *masatia* di Tabanan, tidak mengizinkan lagi para janda, baik para raja, anggota keluarga raja, atau orang lain dibakar bersama jasad suaminya, atau pada umumnya orang-orang siapa pun mereka ikut mati bersama jasad siapa pun itu”

Setelah ditandatangani secara bersama oleh raja, patih, seluruh punggawa, residen dan kontrolir, perjanjian tersebut diteruskan ke gubernur jenderal untuk diratifikasi. Kontrak baru

tersebut diteruskan bersamaan dengan pengiriman dua orang pangeran keponakan raja sebagai keputusan. Mereka diberangkatkan ke Buitenzorg pada 25 Januari 1904 dan diterima oleh gubernur jenderal pada 2 Februari 1904 (K.V., 1904) Selanjutnya kontrak pelarangan *masatia* tersebut diratifikasi berdasarkan Gouverneur Besluit no 1 tertanggal 1 Maret 1904.

Setelah penyelesaian masalah di Tabanan, pemerintah merasa puas dengan hasilnya dan melanjutkan misi untuk menghapus praktik *masatia* di seluruh Bali. Misi ini berjalan lancar tanpa penolakan dari kerajaan mana pun. Setelah menyelesaikan penobatan raja baru di Klungkung yang sempat tertunda karena konflik di Tabanan, pihak karesidenan menyepakati kontrak penghapusan *masatia* dengan Dewa Agung. Pada 23 September 1904, kontrak penghapusan *masatia* di Klungkung ditandatangani oleh Dewa Agung Putra, beberapa pejabat kerajaan, pendeta Ida Pedanda Ktut Pidada, Residen Eschbach, dan Kontrolir Schwartz. Kontrak ini kemudian diratifikasi oleh Gubernur Jenderal pada 22 November 1904.

Setelah kontrak penghapusan *masatia* disepakati dengan Tabanan dan Klungkung, pemerintah kolonial melanjutkan misi ke Badung. Meskipun Raja Badung Gusti Gde Ngurah telah meninggal pada 14 Agustus 1904, upacara kremasi dipastikan tanpa ritual *masatia* (K.V., 1905). Kontrak penghapusan kemudian secara resmi ditandatangani pada 22 Desember 1904 oleh Gusti Ngurah Pemecutan dan Gusti Gde Ngurah Den Pasar serta diratifikasi pada 21 Februari 1905.

Selanjutnya, kontrak serupa dengan Bangli ditandatangani oleh Raja Dewa Gde Tangkeban pada 19 Januari 1905 dan disahkan pada 21 Maret 1905. Dengan pengesahan ini, seluruh kerajaan di Bali resmi menghapus praktik *masatia* untuk selamanya. Pemerintah menganggap kombinasi antara negosiasi dan intimidasi berhasil menundukkan para raja, sehingga misi penghapusan dianggap tuntas (Nypels, 1905).

D. Transformasi Tradisi *Masatia Padem* menjadi *Masatia Rambut*

Secara resmi, memasuki tahun 1905 tradisi *masatia* atau *masatia-satiaan padem* benar-benar dilarang di seluruh Bali. Kasus *masatia* terakhir hanya ditemukan pada 1906 di Badung dan 1908 di Klungkung saat para wanita menyusul kematian suami mereka yang berperang melawan pasukan kolonial. Selanjutnya, sejak Pemerintah Kolonial Belanda berkuasa penuh atas seluruh wilayah Bali, tradisi *masatia* tidak pernah terdengar lagi.

Masyarakat Bali tidak menyatakan respons keberatan atau semacamnya atas pelarangan *masatia*, karena pada dasarnya *masatia* adalah tradisi istana dan sangat minim keterlibatan langsung masyarakat di dalamnya. Akan tetapi, masyarakat mulai memikirkan bagaimana cara mereka menunjukkan kesetiannya ketika para penguasa mereka meninggal. Mereka memikirkan sebuah alternatif yang tidak akan menimbulkan gejolak antara kerajaan dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Masyarakat mengganti kebiasaan *masatia* yang mengisyaratkan untuk ikut mati bersama suami atau tuan mereka dengan sebuah tradisi baru yang disebut *masatia rambut* atau disebut juga

dengan *megundul* (Suada dan Gelgel, 2018). Sesuai dengan namanya *masatia rambut* dilakukan dengan menggunduli rambut hingga habis pada puncak upacara kremasi seorang raja. Menurut orang Bali, rambut adalah mahkota yang berada pada bagian paling hulu dari tubuh sehingga secara simbolis mereka mengorbankan sesuatu yang paling berharga pada tubuhnya kepada sang raja. Gerakan ini dianggap menggantikan *masatia*, dengan tujuan dan makna yang sama tetapi menggunakan cara yang berbeda (Korn, 1932). Walaupun secara filosofis sama dengan *masatia*, pada praktiknya *masatia rambut* malah dilakukan oleh para pria bukan wanita seperti sebelumnya. Belum ada penjelasan secara pasti tentang munculnya tradisi ini, namun memasuki 1930-an pelaksanaannya memang ditemukan ketika para raja meninggal.

Pasca 1905, *masatia rambut* pertama kali diperkenalkan pada upacara kremasi I Gusti Ketut Agung di Kerajaan Mengwi. I Gusti Ketut Agung merupakan Raja Mengwi yang dikenal sebagai titik kebangkitan Mengwi pasca penaklukan oleh Badung. Karena kebesaran jasanya, rakyat Mengwi melakukan *masatia rambut* saat upacara kremasinya yang digelar pada Agustus 1939 (Nordholt, 1996). Mereka menganggap, *masatia rambut* adalah bentuk penghormatan yang layak diberikan kepada raja-raja besar yang berjasa untuk rakyat.

Masatia rambut juga dilakukan saat upacara kremasi Dewa Agung Oka Geg raja terakhir Klungkung (Suada dan Gelgel, 2018). Sosok Dewa Agung Oka Geg memang sangat melekat di hati rakyatnya. Ia telah melewati tiga zaman mulai saat menjadi *regent* pada masa Hindia-Belanda, beralih sebagai *ken-coo* di masa Pendudukan Jepang, dan menjadi raja swapraja pada awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pada upacara kremasi yang berlangsung pada 10 November 1965 rakyat Klungkung melakukan *masatia rambut* dengan menggunduli rambut mereka tanpa tersisa sebagai bentuk penghormatan kepada rajanya.



Gambar 3. Upacara Kremasi I Gusti Ketut Agung 1939
Sumber: Repro Henk Schulte Nordholt (1996)



Gambar 4. Upacara Kremasi Dewa Agung Oka Geg 1965
Sumber: Youtube Puri Agung Klungkung

Keberadaan tradisi *masatia rambut* sebagai pengganti *masatia* memberi gambaran bahwa terjadi sebuah transformasi dalam tradisi masyarakat Bali. Kedua praktik ini pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yakni sebagai bentuk kesetiaan dan pengabdian rakyat kepada rajanya. Meski demikian, pergeseran terjadi dalam konteks pelaksanaannya. Jika pada *masatia*, pemerintah kolonial menilai tradisi tersebut sebagai paksaan dari pihak kerajaan, maka dalam *masatia rambut* justru masyarakat yang menginisiasi dan menciptakan gerakannya secara kolektif.

Perubahan juga tampak pada pelaku tradisinya. Dalam *masatia rambut*, pengorbanan tidak lagi dilakukan oleh perempuan, melainkan oleh laki-laki yang secara sukarela menggunduli rambut mereka sebagai bentuk penghormatan yang lebih sederhana dan simbolik. *Masatia rambut* tercatat hanya dua kali dilaksanakan, yakni di Mengwi pada tahun 1939 dan di Klungkung pada tahun 1965. Setelah itu, tradisi ini tidak pernah lagi terdengar seiring meredupnya sistem feodal sehingga struktur kerajaan di Bali mulai kehilangan otoritasnya setelah bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia.

Transformasi dari *masatia* menjadi *masatia rambut* merupakan bukti bahwa kebudayaan adalah hasil karya manusia yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman (Martono, 2014). Pergeseran ini mencerminkan upaya masyarakat Bali untuk mengekspresikan kesetiaan dan penghormatan secara lebih humanis. Selain itu, perubahan pelaku tradisi dari perempuan menjadi laki-laki menandai adanya dinamika peran gender serta partisipasi sosial dalam menjaga nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, perubahan ini memperlihatkan bahwa kebudayaan bersifat dinamis, selalu menyesuaikan dengan konteks zaman, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kerangka kedinamisan tersebut, perubahan ini menunjukkan bahwa tradisi *masatia* tidak benar-benar punah, melainkan bertransformasi dari bentuk *masatia-satiaan padem* menjadi praktik penghormatan yang lebih humanis melalui *masatia rambut*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi *masatia* merupakan praktik religius di Bali sejak abad ke-16 hingga awal abad ke-20, di mana para janda, abdi, atau pengikut setia ikut mengorbankan diri pada upacara kremasi seorang raja atau bangsawan, baik dengan melompat ke api maupun menusuk diri dengan keris. Masuknya kolonialisme Belanda menjadikan praktik ini sebagai sorotan dan dianggap tidak manusiawi, terutama setelah insiden *masatia* di Tabanan tahun 1903 yang memicu intervensi militer dan diplomatik. Melalui serangkaian kontrak politik dengan kerajaan-kerajaan Bali pada 1904–1905, pemerintah kolonial akhirnya berhasil menghapus praktik tersebut.

Pasca tahun 1905, praktik *masatia* nyaris tidak lagi ditemui di Bali. Tradisi tersebut hanya tercatat terjadi pada perang Badung tahun 1906 dan perang Klungkung tahun 1908, ketika para perempuan memilih menyusul suami mereka yang melakukan puputan. Setelah peristiwa itu, *masatia* tidak pernah lagi dilaksanakan. Sekitar tahun 1939, muncul gerakan kolektif *masatia* rambut yang dimaknai sebagai bentuk transformasi atas *masatia* sebelumnya. Dengan demikian, pelarangan praktik *masatia* pada awal abad ke-20 tidak serta-merta menghapus nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Larangan yang diberlakukan pemerintah kolonial berfokus pada bentuk pelaksanaan *masatia* terkait *masatia-satiaan padem* yang dianggap ekstrem dan tidak manusiawi karena melibatkan pengorbanan diri melalui pembakaran atau penusukan diri.

Sebagai respons terhadap perubahan sosial dan intervensi kolonial, masyarakat Bali mentransformasikan *masatia* menjadi bentuk yang lebih simbolik dan humanis melalui tradisi *masatia rambut*. Tradisi ini mempertahankan makna kesetiaan dan penghormatan tanpa kekerasan fisik, diwujudkan lewat tindakan menggunduli rambut sebagai simbol pengorbanan diri. Menariknya, dalam *masatia rambut* justru kaum laki-laki turut berpartisipasi, menandai pergeseran dari ritual yang sebelumnya menjadi domain perempuan menuju ekspresi kolektif lintas gender. Perubahan ini menunjukkan bahwa yang dilarang adalah bentuk pelaksanaannya yang ekstrem, bukan nilai kesetiaan dan penghormatan di dalamnya. Dengan demikian, *masatia* tidak lenyap, melainkan bertransformasi menjadi tradisi lebih selaras dengan nilai kemanusiaan.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan sejarah atau kajian budaya, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang nilai kemanusiaan dan cara masyarakat menegosiasikan tradisi dalam arus perubahan. Penulis menyadari bahwa masih ada banyak aspek yang belum terjamah. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal bagi kajian selanjutnya, terutama bila ada temuan sumber atau perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman mengenai transformasi tradisi *masatia* di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. G. Putra. (2010). *Bali's early days: Widow sacrifice, slavery & opium*. Denpasar: Saritaksu.
- Agung, I. A. A. Gde. (1989). *Bali pada abad XIX: Perjuangan rakyat dan raja-raja menentang kolonialisme Belanda 1808–1908*. Yogyakarta: UGM University Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (1964). *Surat-surat perdjanjian antara keradjaan-keradjaan Bali/Lombok dengan pemerintah Hindia Belanda 1841–1938*. Djakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Barokah, S. (2016). An ethnographic investigation of master- slave relation in Sumba, Indonesia. *International Institute of Social Studies*.
- Bharatayuddha (Transkripsi). Koleksi Gedong Kirtya Singaraja, No. 5107/IVb.
- Cote, J. (1996). Kolonialisasi Sulawesi Tengah: “Kebijakan etis” dan ekspansi imperialis 1890–1910. *Itinerario*, 20(3), 1–20.
- Craadijk, H. (1906). Bali en Imperialisme. In J. E. De Meyier (Ed.), *De Indische Gids*, 28(1).
- Creese, H. (2012). *Perempuan dalam dunia kakawin: Perkawinan dan seksualitas di istana indic Jawa dan Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- “De verbrandingsquaestie te Tabanan” [Berita]. (1903, November 2). *De Locomotief*, No. 255.
- Fisch, J. (2005). Dying for the dead: Sati in universal context. *Journal of World History*, 1(1), 293–325.
- Heurnius, J. (1856). Het gezantschap naar Bali, onder den gouverneur-generaal Hendrik Brouwer in 1633. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, 5, 1–71.
- Huan, M. (1970). *Ying-yai Sheng-lan: The overall survey of the ocean's shores 1433* (Ch'eng-chiin, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kolonial Verslag. (1891).
- _____. (1901).
- _____. (1904).
- _____. (1905).
- Korn, V. E. (1932). *Het adatrecht van Bali*. Gravenhage: G. Naeff.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lodewycksz, W. (1915). *De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595–1597* (Vol. 1, G. P. Rouffaer & J. W. Ijzerman, Eds.). Gravenhage: Nijhoff.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, kekuasaan, disiplin, hukuman dan seksualitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nordholt, H. S. (1996). *The spell of power: Sejarah politik Bali 1690–1940*. Denpasar: Pustaka Larasan.

- Nypels, G. (1905). Oorlogsgebruiken in onzen strijd met minder beschaafden. *orgaan moederland en koloniën, VI*.
- Partami, N. L., et al. (2016). *Kamus Bali-Indonesia*. Denpasar: Balai Bahasa Bali.
- Pires, T. (1944). *The suma oriental of Tome Pires: An account of the east from red sea to Japan written in Melaka and India 1512–1515* (A. Cortesao, Trans.). London: Hakluyt Society.
- Purchas, S. (1905). *Hakluytus posthumus, or Purchas his pilgrimages: Contayning history of the world in sea voyages and lade travells by Englishmen and others_*(Vol. 2). J. MacLehose and Sons.
- Putra, I. K.S., & Santoso, D. B. (2020). *Bade dalam prosesi ngaben masyarakat Bali*. Yogyakarta: Kepel Press–Badan Pelestarian Nilai Budaya Bali.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia modern 1200–2004*. Jakarta: Serambi Ilmu.
- Robinson, G. (1995). *The dark side of paradise: Political violence in Bali*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Stanley, 1874): Stanley, H. E. J. (1874). *The first voyage round the world by Magellan: Translated from the accounts of Pigafetta and other contemporary writers*. Hakluyt Society.
- Suada, I. N., & Gelgel, I. P. (2018). Transformation of Masatia towards Hindu religions in Bali. *International journal of social sciences and humanities, 2*(2).
- Vickers, A. (1989). *Bali: A paradise created*. Periplus Editions.
- Yuda, I. G. A. N. Dharma. (2024). “Intervensi kolonial pada tradisi masatia di Bali 1903–1905”. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.
- Youtube Puri Agung Klungkung: Puri Agung Klungkung Official. (2021, Jan 30). “Peristiwa/ Pelebon Ide I Dewa Agung Oka Geg atau Ide Batare Mampeh” [Video]. Youtube. https://youtu.be/Q57suBcaAgU?si=f2z3_w4hdkf7jLAul

